



**KABUPATEN MUKOMUKO**

**MINGGU, 29 NOVEMBER 2020**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Khawatir Jadi Temuan BPK**

**MUKOMUKO** - Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Mukomuko, Dedi Ramadhan khawatir bakal jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait banyaknya pekerjaan yang sudah tuntas perencanaan, namun belum dikerjakan fisiknya.

Apalagi dari pengajuan pekerjaan yang diusulkan, anggarannya yang sudah tuntas perencanaannya mencapai sekitar 30 persen. "Bukan tidak mungkin perencanaan yang telah dilakukan itu menjadi temuan BPK. Karena yang kami khawatirkan, bisa jadi dinilai ada potensi kerugian negara dari anggaran perencanaan yang telah digunakan. Sementara tidak ada tindak lanjut berikutnya berupa pembangunan fisik. Mubazir istilahnya," katanya.

Pihaknya sudah mengusulkan pengalokasikan anggaran fisik. Namun pada proses penganggaran, mulai dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sampai ketuk palu di DPRD Mukomuko, usulan tersebut kerap tidak diakomodir. "Malah yang muncul, pekerjaan baru," sebutnya.

Setiap masa penganggaran, lanjutnya, dari Dinas Perkim selalu mengusulkan anggaran fisik pembangunan drainase maupun MCK yang sudah tuntas perencanaan. Apalagi cukup banyak proposal yang masuk dari masyarakat. "Sekitar 30 persen usulan dinas sudah kita tindak lanjuti. Perencanaannya sudah tuntas. Artinya tinggal pelaksanaan fisiknya lagi, itu jika anggarannya diakomodir," sampainya.

Setidaknya ada sekitar 30 pekerjaan drainase lingkungan dan MCK yang perencanaannya sudah tuntas, tersebar di 10 kecamatan. Estimasi anggarannya pun beragam. Umumnya di bawah Rp 200 juta.

Menurutnya, pekerjaan drainase dan MCK yang telah selesai perencanaan itu, plotting anggaran seharusnya menjadi skala prioritas. Sebab, sudah ada uang negara yang dikeluarkan untuk membiayai perencanaan yang telah dilaksanakan tersebut. "Seringnya, pada ujungnya yang diusulkan tersebut belum dapat diakomodir," katanya.

Ia berharap ditahun-tahun berikutnya, usulan Perkim bisa diakomodir. Agar pekerjaan wajib di Perkim tidak terus menumpuk, tanpa ada penyelesaian. (hue)